
D.G.T.C

DJPK
Goes To Campus
2018

“PENGELOLAAN APBN, APBD DAN PELAYANAN PUBLIK”



SESI 1



SAAT **INI**, KITA BERTANGGUNG **JAWAB**
KARENA **MEMEGANG** ESTAFET
KEMERDEKAAN DAN KEPEMIMPINAN...

Tujuan Indonesia Merdeka

- melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia
- memajukan kesejahteraan umum,
- mencerdaskan kehidupan bangsa,
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial



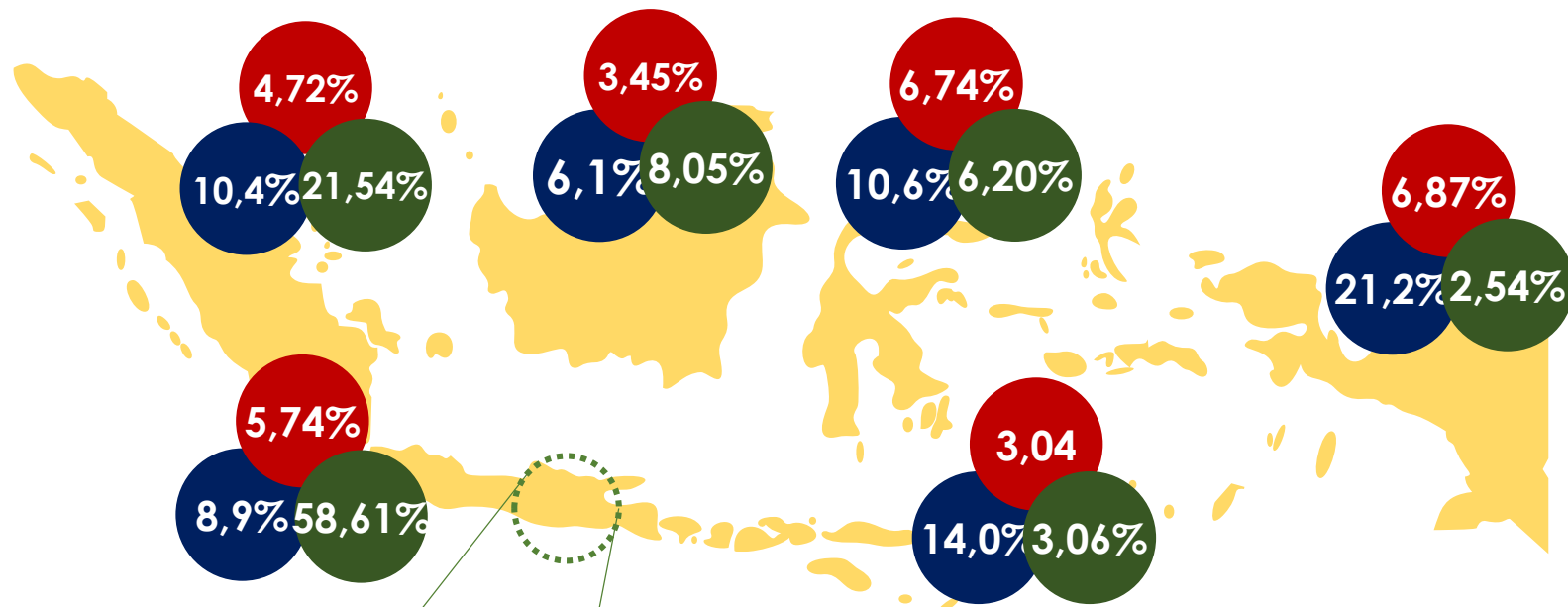
Estafet Kemerdekaan

Kita saat ini memegang estafet kemerdekaan dan bertanggung jawab untuk membawa Indonesia **makin mendekati tujuan kemerdekaannya**





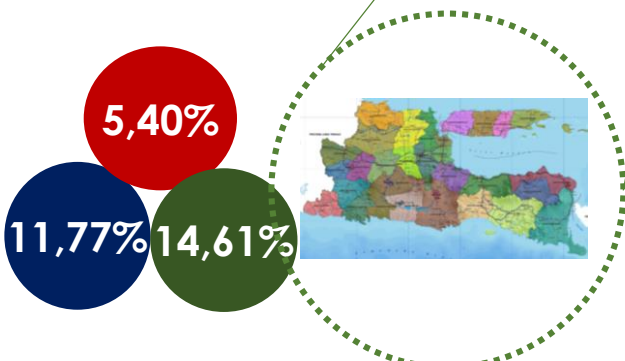
TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MENJADI NEGARA MAJU



● Pertumbuhan Ekonomi Tw III 2018, YoY

● Distribusi PDB ADHB 2017

● Tingkat Kemiskinan Daerah, per Maret 2018



Provinsi Jawa Timur



FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL

MUSGRAVE, 1959 : *Theory of Public Finance* Fungsi Kebijakan Fiskal



ALOKASI

Instrumen meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas penggunaan dan alokasi sumber daya antarbidang/program/ kegiatan dan sektor.



DISTRIBUSI

Instrumen mewujudkan pemerataan dan keadilan antarkelompok penghasilan masyarakat dan antarwilayah.



STABILISASI

- Instrumen memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
- Instrumen meredam krisis, menstabilkan fluktuasi perekonomian, dan menjaga stabilitas harga.

• Fungsi Distribusi dan Fungsi Stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Fungsi Alokasi dilakukan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat (HAYEK (1949), TIEBOUT (1956), OATES (1972))

PEMERINTAH DAERAH



MEDEKATKAN RENTANG KENDALI



KEINGINAN PUBLIK LOKAL



KESEJAHTERAAN

Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar hubungan dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



TUJUAN DESENTRALISASI FISKAL

6



Ultimate Objective

mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk peningkatan:



Pelayanan Publik
(*public service delivery*)



Kesejahteraan Masyarakat
(*social welfare*)

Intermediate Target



- akselerasi pengentasan kemiskinan;
- mengatasi ketimpangan penghasilan/ kesejahteraan antarkelompok masyarakat; dan
- mempersempit (mengeliminasi) kesenjangan pelayanan publik antardaerah



**INSTRUMEN MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NKRI :
ALAT STRATEGIS PEREKAT SEMUA DAERAH DALAM NKRI**



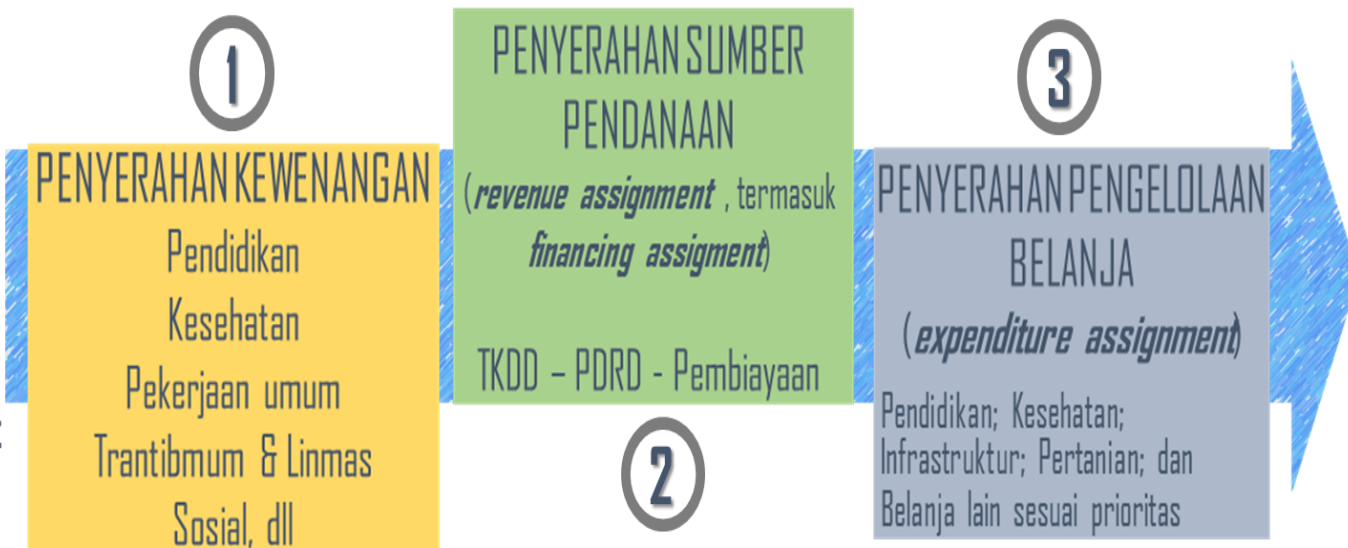
PRINSIP DESENTRALISASI FISKAL

Pelaksanaan kebijakan Otonomi daerah dan Desentralisasi Fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan atau berdasarkan prinsip *money follows functions* dan *money follows program*.

money follows functions



Pemerintah Pusat



Pemerintah Daerah

money follows program





APBN ADALAH INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF & BERKELANJUTAN



APBN

{ Pajak, Bea Cukai, PNBPN }
{ Belanja Pempus, **Transfer ke daerah & Dana Desa**,
Pembiayaan }

KESEHATAN

PENDIDIKAN

INFRASTRUKTUR

KEAMANAN

KESEJAHTERAAN

{ IPM, Kemiskinan, Pernerataan, Keadilan }





FOKUS APBN

**EFISIENSI DAN
KUALITAS BELANJA
PRIORITAS**



Pengurangan Kemiskinan
Pengurangan Kesenjangan
Penciptaan Kesempatan Kerja

**OPTIMALISASI DAN
REFORMASI
PENERIMAAN
NEGARA**



Pajak
Kepabeanan dan Cukai
PNBP

**JAGA MOMENTUM
EKONOMI DAN
KEPERCAYAAN
RAKYAT**



Keberlanjutan Pembiayaan
Utang Terkendali
Pertumbuhan Lebih Baik



INVESTASI MELALUI APBN



Sumber Daya Manusia



- Pendidikan
- Kesehatan
- Agama, Budi pekerti

Infrastruktur



- Konektivitas
- Produktivitas
- Mobilitas

Institusi



- Birokrasi yang efisien
- Perang terhadap korupsi
- Peran Pemerintah Daerah
- Pelayanan publik yang berkualitas

Penelitian dan Teknologi



- R&D Pemerintah dan Swasta
- Start-up, Ekonomi Digital
- E-Commerce
- Ekonomi kreatif & inovatif



CAPAIAN OUTPUT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015-2018

Jalan (km)



Jalan sepanjang 4.418,8 Km (termasuk jalan tol dan jembatan)

Bandara



Pembangunan 10 bandara baru dan revitalisasi serta pengembangan 480 bandara

Perumahan



Pembangunan 2.962.335 unit rumah terutama bagi Masy. Berpenghasilan Rendah.

Bendungan

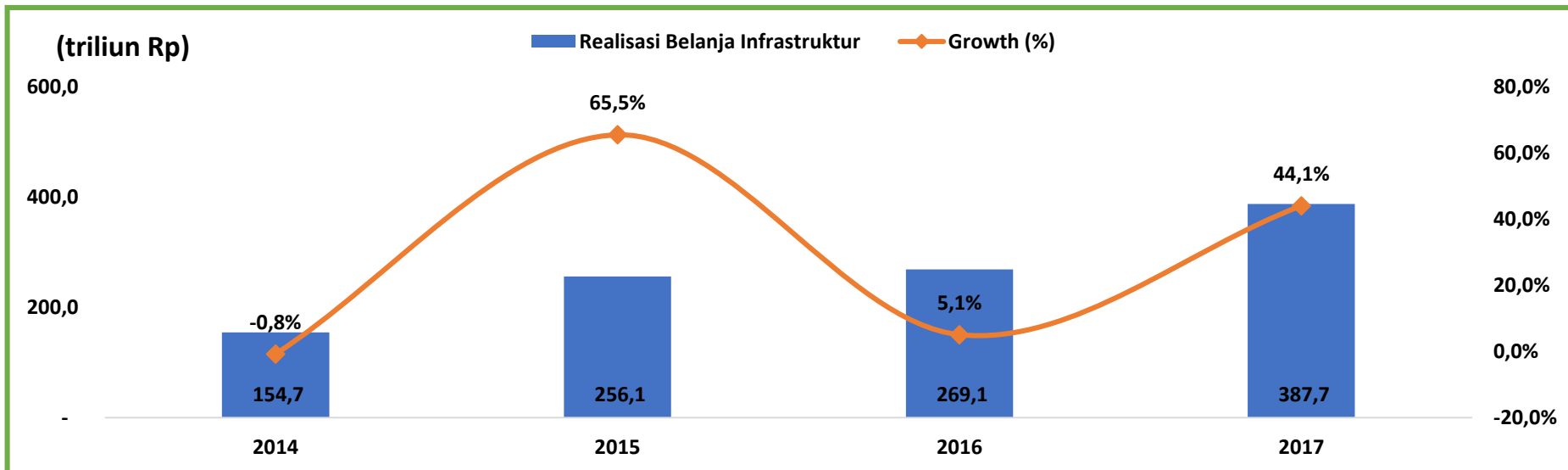


Pembangunan 8 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan pangan

Jalur Kereta Api (km)



Pembangunan baru (3.258 km'sp hingga 2019), tidak termasuk LRT Sumsel dan Jabodebek)



Belanja Infrastruktur secara konsisten terus bertambah jumlahnya sebagai bukti komitmen Pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur

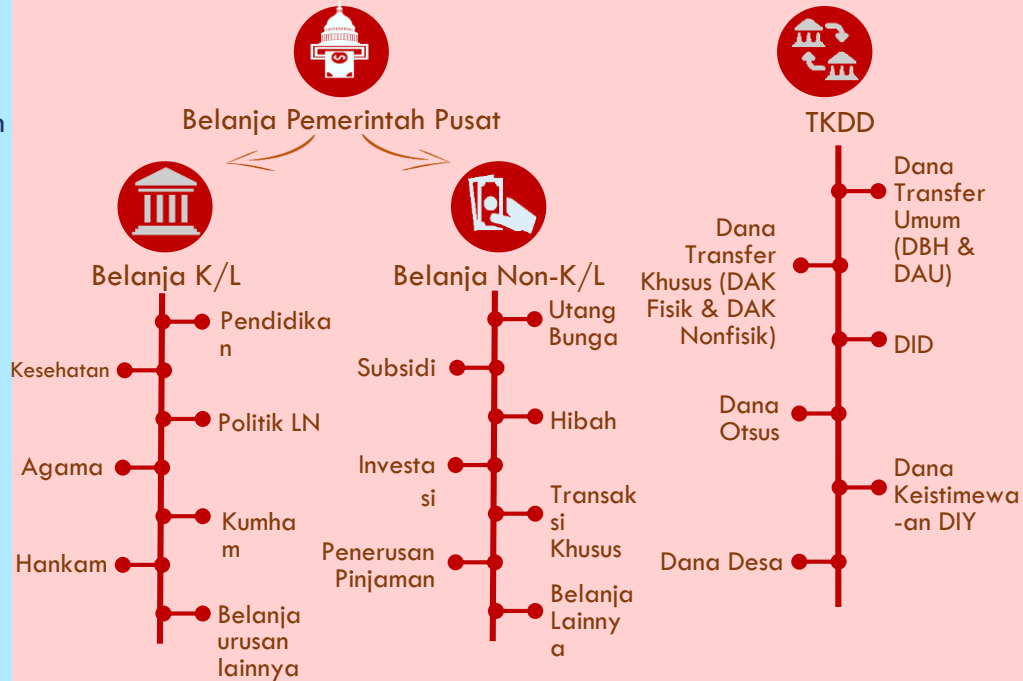


APBN

Pendapatan



Belanja





POSTUR APBN 2019

(Dalam Triliun Rupiah)

Pendapatan Negara

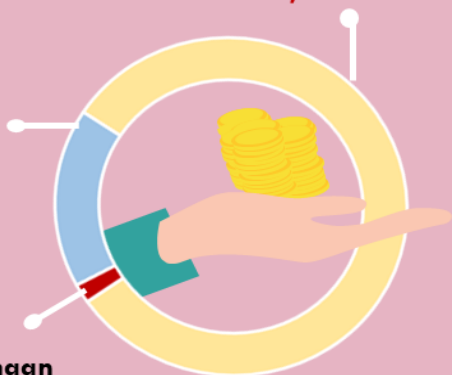
Rp2.165,1 T

Penerimaan Perpajakan

1.786,4

PNBP
378,3

Penerimaan Hibah
0,4



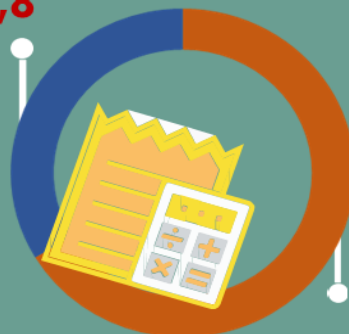
Belanja Negara

Rp2.461,1 T

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

826,8

Belanja Pemerintah Pusat
1.634,3



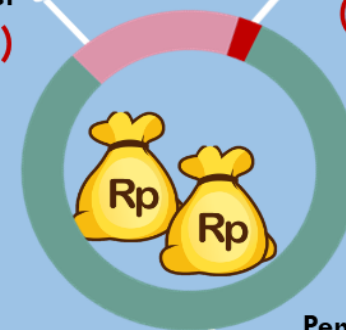
Pembiayaan Anggaran

Rp296,0 T

Pembiayaan Investasi
(75,9)

Pemberian Pinjaman
(2,4)

Pembiayaan Utang
359,3



APBN yang Adil, Aman, dan Mandiri

Jangkar dalam menciptakan stabilitas makroekonomi

Instrumen kebijakan fiskal yang efektif

Stimulus yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi



Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan





POSTUR APBN 2019

Uraian (triliun Rupiah)	2018	2019		
	Outlook APBN	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.903,0	2.142,5	2.165,1	22,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.897,6	2.142,1	2.164,7	22,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.548,5	1.781,0	1.786,4	5,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	<i>11,57</i>	<i>12,11</i>	<i>12,22</i>	
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	349,2	361,1	378,3	17,2
II. PENERIMAAN HIBAH	5,4	0,4	0,4	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.217,3	2.439,7	2.461,1	21,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.453,6	1.607,3	1.634,3	27,0
1. Belanja K/L	813,5	840,3	855,4	15,2
2. Belanja Non K/L	640,2	767,1	778,9	11,8
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,6	832,3	826,8	(5,6)
1. Transfer ke Daerah	703,6	759,3	756,8	(2,6)
2. Dana Desa	60,0	73,0	70,0	(3,0)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(64,8)	(21,7)	(20,1)	1,6
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(314,2)	(297,2)	(296,0)	1,2
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,12)</i>	<i>(1,84)</i>	<i>(1,84)</i>	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	314,2	297,2	296,0	(1,2)
I. PEMBIAYAAN UTANG	387,4	359,3	359,3	(0,0)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(65,7)	(74,8)	(75,9)	(1,1)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(6,5)	(2,3)	(2,4)	(0,1)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,1)	0,0	0,0	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,2	15,0	15,0	0,0

POSTUR APBN: PENERIMAAN PERPAJAKAN

PAJAK DAN CUKAI

JENIS	DASAR PENGENAAN	TARIF
PPH	Penghasilan	OP: 5%, 15%, 25%, 30% Badan: 25%
PPN	Transaksi penyerahan barang dan jasa	10%
PBB	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah dan Bangunan	$0,5\% \times \text{NJOP}$ $\text{NJKP} = 40\% \times \text{NJOP}$
CUKAI	Barang kena cukai, antara lain: 1. etil alkohol atau etanol 2. minuman yang mengandung etil alkohol 3. hasil tembakau	Tarif cukai spesifik yang diatur Menteri Keuangan



BEA

JENIS	DASAR PENGENAAN	TARIF
Bea Masuk	Barang yang masuk pabean NKRI: 1. Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation (MFN) 2. Bea Masuk Free Trade Agreement (FTA) 3. BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) dan BMTP (Bea Masuk Tindak Pengaman) 4. Pajak dalam rangka Impor (PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22)	Dihitung dari unsur harga barang (Cost), unsur Asuransi (Insurance), dan biaya angkut (Freight)
Bea Keluar	Barang ekspor, yang terdiri dari: 1. Kayu dan Kulit 2. Biji Kakao 3. Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya 4. Produk Hasil Pengolahan Mineral Logam 5. Produk Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu	a. Berdasarkan persentase dari harga ekspor b. Ditetapkan secara spesifik
Bea Meterai	Dokumen tertentu yang menjadi objek Bea Meterai	Rp3.000,- Rp6.000,-



POSTUR APBN: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PEMANFAATAN SDA



Pendapatan Minyak Bumi



Pendapatan Kehutanan



Pendapatan Pertambangan Panas Bumi



Pendapatan Gas Bumi



Pendapatan Perikanan

PEMANFAATAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN



Deviden



Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah



- Bagian Laba Pemerintah pada LPEI
- Akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada LPEI



Surplus LPS Bagian Pemerintah

PEMANFAATAN PENDAPATAN BLU

Pendapatan Jasa Layanan Umum



Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

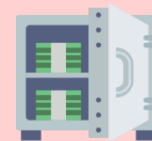
Pendapatan Hibah BLU



Pendapatan BLU Lainnya

PNBP LAINNYA

Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah



Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi



Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri



UANG

BARANG ATAU JASA



SURAT BERHARGA



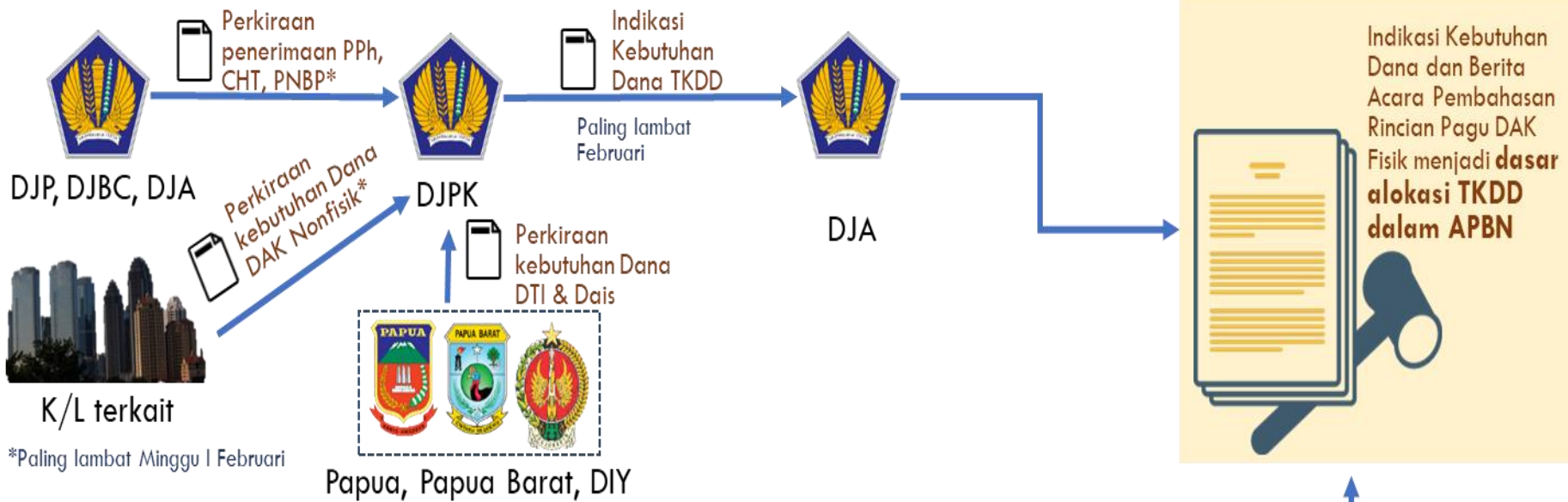


SIKLUS APBN: PROSES ANGGARAN





SIKLUS APBN: PROSES PENGANGGARAN TKDD





POSTUR TKDD

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2019

untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di Daerah dengan konsep *Value for Money*, serta memerangi korupsi dan penyalahgunaan TKDD

766,2 → 826,8



Transfer ke Daerah 697,0 → 756,8

DAU 401,5 → 417,9

- Bersifat **STABIL/FINAL** untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD
- Rp3 T untuk bantuan pendanaan kelurahan
- Mempertahankan afirmasi luas wilayah laut 100%
- Memperhitungkan kenaikan gaji 5%, gaji 13 dan THR, serta formasi CPNS

DBH 89,2 → 106,4

(Akibat naiknya harga minyak dan kurs)

- 50% DBH CHT untuk JKN
- DBH DR dapat untuk pencegahan kebakaran hutan dan perhutanan sosial
- Sharing* beban jika harga komoditi dan subsidi naik
- Penyelesaian kurang bayar pada TW IV

DAK Fisik 59,3 → 69,3

- Pemerataan layanan publik
- Peningkatan alokasi untuk pendidikan
- Penambahan subbidang GOR dan perpustakaan daerah

DAK Nonfisik 117,4 → 131,0

- Perbaikan kualitas kinerja (BOS Kinerja)
- Peningkatan unit cost untuk pendidikan vokasi
- Afirmasi untuk daerah tertinggal, terluar, transmigrasi

DID 8,5 → 10,0

Penambahan kategori penilaian, yaitu:

- Kemudahan Berusaha, untuk mendorong perbaikan iklim investasi
- Pengelolaan Sampah, untuk meningkatkan kualitas lingkungan

Dana Otsus, DTI, dan DK DIY

21,1 → 22,2

- Pendanaan pendidikan, sosial, kesehatan, dan infrastruktur di Aceh, Papua, dan Papua Barat
- Pendanaan urusan keistimewaan di DIY

Dana Desa 60,0 → 70,0

- Reformulasi dan afirmasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan
- Melanjutkan skema padat karya tunai
- Meningkatkan porsi penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat
- Penguatan kapasitas SDM desa dan tenaga pendamping desa

Rata-Rata per Desa

2018: Rp800 juta



2019: Rp934 juta



Transfer ke daerah dan dana desa sebagai instrument kebijakan desentralisasi fiskal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik

JENIS DANA DAN TUJUAN

DBH

Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan fiskal di daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik.

DAU

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

DAK FISIK

DAK Fisik berperan sangat penting untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah guna meningkatkan layanan dasar publik dan sekaligus menyediakan prasarana bagi penunjang kegiatan ekonomi di daerah.

DAK NONFISIK

DAK Nonfisik dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik untuk pelayanan publik yang merupakan urusan daerah

DID

Dana Insentif Daerah ditujukan untuk memotivasi dan memacu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat

OTSUS & DAIS DIY

Ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan, mempercepat penyediaan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, Papua Barat, Aceh, dan DIY.

DANA DESA

Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui kabupaten/kota, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat

Total TKDD Se-Prov. Jawa Timur



(Dalam Triliun Rp)



Kebijakan Umum

- a) Penyaluran DBH untuk triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau DBH Tahun berjalan dengan memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya.
- b) Dalam hal realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan melebihi pagu penerimaan yang dianggarkan dalam tahun 2019, Pemerintah menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan kondisi keuangan negara.
- c) Dalam hal realisasi PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasikan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu dari peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasikan.

Postur DBH

(miliar Rp)

DANA BAGI HASIL	Outlook 2018	RAPBN 2019	APBN 2019	SELISIH (dengan Outlook)	
				Rp	%
1	2	3	4	5=4-2	6
1. DBH Pajak	56.684,0	52.440,9	52.438,6	-4.245,4	-7,49%
a. PPh	37.428,5	31.336,0	31.336,0	-6.092,5	-16,28%
- PPh Pasal 21	32.986,6	29.151,3	29.151,3	-3.835,3	-11,63%
- PPh Pasal 25/29	4.441,9	2.184,7	2.184,7	-2.257,2	-50,82%
b. PBB	16.290,9	17.927,7	17.925,5	1.634,6	10,03%
c. Cukai Hasil Tembakau	2.964,6	3.177,1	3.177,1	212,5	7,17%
2. DBH Sumber Daya Alam	32.541,4	51.581,1	53.911,5	21.370,1	65,67%
a. Migas	15.569,1	29.496,3	30.941,4	15.372,3	98,74%
- Minyak Bumi	9.235,3	16.254,6	18.384,0	9.148,7	99,06%
- Gas Bumi	6.333,7	13.241,7	12.557,3	6.223,6	98,26%
b. Mineral dan Batubara	14.286,8	19.173,6	19.968,6	5.681,8	39,77%
- Iuran Tetap	615,9	442,4	457,0	-158,9	-25,81%
- Royalti	13.671,0	18.731,2	19.511,6	5.840,6	42,72%
c. Kehutanan	1.645,0	1.763,1	1.798,2	153,2	9,32%
- PSDH	736,8	744,8	744,8	8,0	1,08%
- IIUPH	164,7	174,1	174,1	9,4	5,69%
- Dana Reboisasi	743,5	844,2	879,4	135,9	18,28%
d. Panas Bumi	560,5	647,6	702,7	142,2	25,37%
e. Perikanan	480	500,6	500,6	20,6	4,30%
Jumlah	89.225,3	104.022,0	106.350,2	17.124,9	19,19%

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Untuk Bidang Kesehatan

- ❑ DBH CHT hanya diterima daerah penghasil CHT, sehingga tidak *fair* bila digunakan untuk mengatasi deficit BPJS.
- ❑ DBH CHT membantu secara tidak langsung, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) guna meningkatkan efisiensi pembiayaan layanan kesehatan.

UU No 39/2007 ttg Cukai → penggunaan DBH CHT:

- Peningkatan Kualitas Bahan Baku,
- Pembinaan Industri,
- Pembinaan Lingkungan Sosial,
- Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan
- Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

UU No 15/2017 tentang APBN TA 2018 dan UU APBN TA 2019

DBH CHT digunakan untuk mendanai 5 program sebagaimana diatur UU No 39/2007 dengan **prioritas pada bidang kesehatan** untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN)

PMK No 222/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau:
DBH CHT digunakan min **50%** utk kegiatan Bidang Kesehatan yang mendukung JKN (*supply side*)

1. Kegiatan bidang kesehatan meliputi :

- Pelayanan kesehatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
- Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarpras FasKes yg bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (Prioritas FKTP),
- pelatihan medis maupun non medis pada unit FasKes,
- Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang terdaftar oleh Pemerintah Daerah atau/atau pembayaran luran Jaminan Kesehatan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

2. **Monev:** Pemda menyampaikan laporan per semester kepada DJPK

3. **Sanksi:** Penundaan, penghentian atau pemotongan penyaluran.

Hasil monitoring Penggunaan

1. Alokasi DBH CHT 2018 18 provinsi dan 336 kabupaten/kota = Rp2.964,6M → DBH untuk kesehatan minimal 50% sebesar Rp1.982,3M
2. Hasil monitoring realisasi penggunaan DBH CHT sampai dengan semester 1 tahun 2018 terhadap 15 provinsi dengan total alokasi Rp2.582,1M (87,1% dari total alokasi nasional) → telah teralokasi untuk bidang kesehatan yang mendukung JKN sebesar Rp1.368,6M atau 53,0%

Alokasi DBH CHT 2018 dan 2019

2018

Rp2.964,6 M

Untuk 18 Provinsi dan 336 kabupaten/kota

7%

2019

Rp3.177,1 M

Untuk 19 Provinsi dan 342 kabupaten/kota



PENGATURAN PENGGUNAAN DBH DR TA 2019

(PMK No. 230/PMK.07/2017)

ARAH KEBIJAKAN DBH DR

1 MENDANAI KEGIATAN yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2 MENDUKUNG PROGRAM pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan

3 DIPRIORITASKAN Diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

DBH DR TA 2019

Alokasi TA 2019 → Provinsi : Rp 879,4 M naik sebesar 135,9 M (18,2%) dr th 2018
Sisa DBH DR Definitif berdasarkan S-408.1/PK/2018 sebesar Rp 4.809,0 M:

- Provinsi sebesar Rp 292,1 M
- Kab/Kota sebesar Rp 4.516,9 M

Total Alokasi DBH DR s.d Th 2019 sebesar Rp 5.688,4 M

PENGGUNAAN DBH DR

DBH DR Provinsi:

membayai kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya.

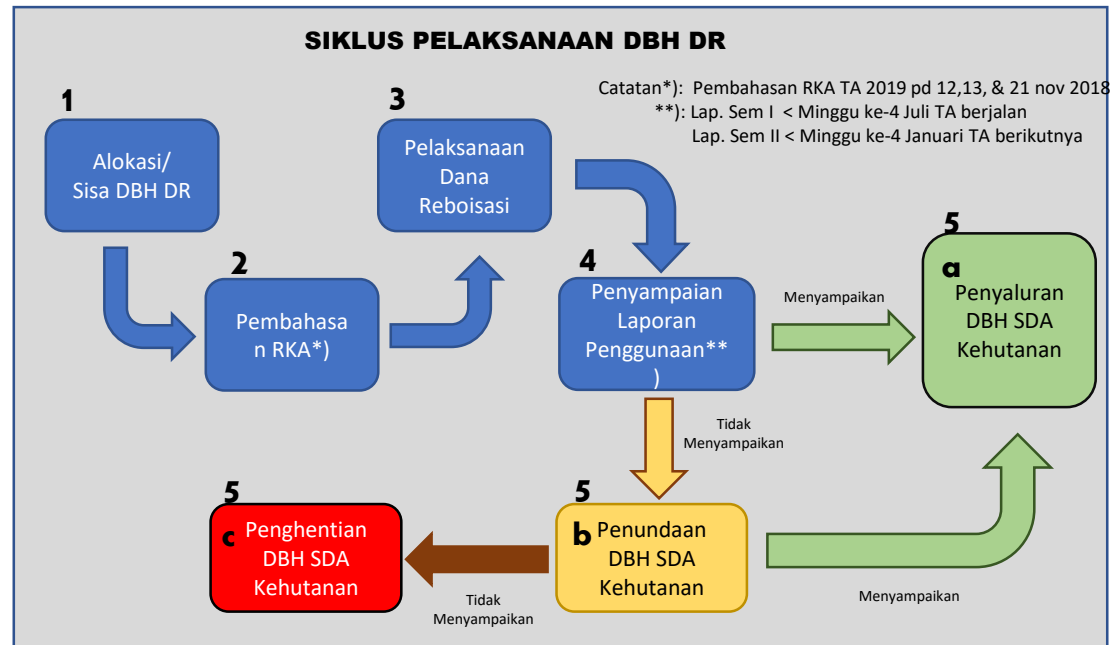
Kegiatan pendukungnya meliputi :

- Perlindungan dan pengamanan hutan;
- Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- Pengembangan perbenihan;
- Litbang, diklat, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan;
- Pembinaan; dan/atau
- Pengawasan dan pengendalian.

sisa DBH DR kabupaten/kota :

- Pengelolaan taman hutan raya (Tahura);
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; dan
- Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

Rincian Penggunaan di atur dalam Perdirjen PK No. 1/PK/2018





KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DBH TA 2019



Siklus Penyaluran DBH

Ket *): Penyaluran paling tinggi 30% dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara semester 1

Jenis DBH	Pola Penyaluran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
DBH PAJAK													
PPh	Triwulan			20%			20%			≤30%*)			sisa
CHT	Triwulan			25%			25%			30%			sisa
PBB Migas & pabum	triwulan			20%			20%			≤30%*)			sisa
PBB P3 bagirata	3 tahap				30%				50%			sisa	
PBB P3 Bagian daerah	mingguan										Mulai Agustus		
DBH SDA													
DBH SDA Migas, Minerba, dan Pabum	Triwulan			20%			20%			≤30%*)			sisa
DBH SDA Perikanan dan Kehutanan	Triwulan			15%			15%			≤30%*)			sisa

Catatan: Penyaluran DBH CHT dan DBH DR dilaksanakan dengan memperhatikan syarat penyaluran

DANA ALOKASI UMUM: FORMULASI, KEBIJAKAN, PENYALURAN, SANKSI

DAU adalah dana yang bersumber dari *Pendapatan APBN* yang dialokasikan dengan tujuan **pemerataan kemampuan keuangan antardaerah** untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan *Desentralisasi*.
(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

Formulasi

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

AD : Memperhitungkan gaji PNSD, mencakup gaji pokok, rencana kenaikan gaji, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan jabatan, Gaji ke-13 dan THR serta formasi Calon PNSD

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
Pagu DAU Nasional minimal 26% dari PDN Neto setelah dikurangi penerimaan negara yang bersifat **earmarked** dan **TKDD non-DAU**

Reformulasi komposisi Gaji ke-13 dan THR

- Memperhitungkan beban urusan pemerintahan antara provinsi, kab, dan kota.
- **Penguatan afirmasi** kepada daerah kepulauan

Pagu Alokasi DAU nasional dalam APBN 2019 bersifat final

Penggunaan minimal 25% DTU (DAU dan DBH) untuk **belanja infrastruktur** disertai pengetatan kepatuhan

Penyaluran DAU

Penundaan dan Pemotongan DAU

TUNAI

NON TUNAI

Tunai: Setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan

Nontunai:

Konversi penyaluran DAU dan/atau DBH dalam bentuk nontunai (SBN) terhadap daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar

Pemotongan DAU

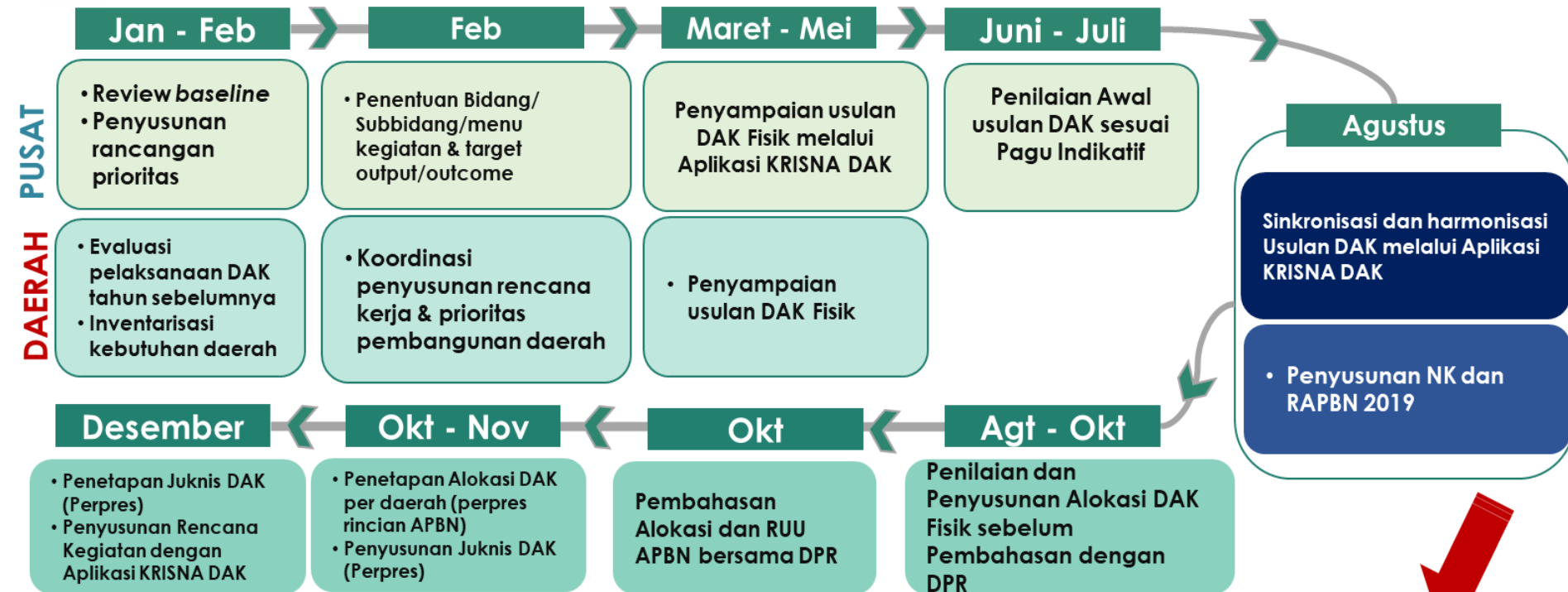
- ❑ **PMK No. 86/PMK.07/2018**
Daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada DOB
- ❑ **PMK No. 121/PMK.07/2017**
Pemda yang mempunyai tunggakan atas kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, termasuk dana investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, penerusan pinjaman Luar Negeri, dan PT SMI.
- ❑ **PMK No. 183/PMK.07/2017**
Pemotongan DAU untuk pembayaran tunggakan iuran BPJS
- ❑ **PMK No. 50/PMK.07/2017**
Penundaan dan pemotongan terkait pemenuhan *Mandatory Spending*
- ❑ **PMK No. 257/PMK.07/2015**
Penundaan dan pemotongan terkait pemenuhan ADD

Penundaan DAU

- ❑ **PMK No. 112/PMK.07/2017**
Penundaan penyaluran DAU dlm hal pemda belum menyampaikan laporan:
✓ Laporan belanja infrastruktur daerah
- ❑ **PMK No. 18/PMK.07/2015**
Penundaan dalam hal blm menyampaikan laporan:
✓ Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan utk 12 bln;
✓ Laporan posisi kas bulanan; dan
✓ Laporan realisasi APBD
- ❑ **PMK No. 04/PMK.07/2011**
Penundaan penyaluran DAU dalam hal Pemda belum menyampaikan Informasi Keuangan Daerah

Penggunaan

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK: PENGALOKASIAN



PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

K/L Teknis

- Penilaian mengacu pada:
- data teknis DAK;
 - prioritas Nasional;
 - tingkat pencapaian SPM;
 - target output dan outcome:
 - jangka menengah;
 - per tahun secara nasional;
 - Sumber pendanaan lainnya.

Bappenas

- Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:
- Data teknis DAK;
 - lokasi prioritas;
 - prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

Kemenkeu

- Menilai pada aspek:
- Standar Biaya Satuan;
 - Indeks kemahalan konstruksi.
 - kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

Provinsi

- Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
- Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi

DAK NONFISIK

PENGANGGARAN DAK NONFISIK



PENGALOKASIAN DAK NONFISIK

Perhitungan alokasi dilakukan oleh tiap-tiap Kementerian/Lembaga Teknis dengan formula :

Unit Cost



Target Pelayanan

JENIS-JENIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

- Dana Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD



- Dana Bantuan Operasional Kesehatan
- Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan





DAK FISIK



Penyediaan sumber air minum layak bagi :

- 18.592 jiwa perluasan dan peningkatan SR dengan
 - SR Murah: 2.969 unit
- 82.044 jiwa melalui pembangunan SPAM dengan
 - SR Murah: 11.971 unit



Pembangunan prasarana sanitasi untuk 40.717 jiwa

- IPAL Komunal sebanyak 96 Unit
- Tangki Septi sebanyak 66 unit
- MCK Kombinasi IPAL Komunal sebanyak 2 unit



Jalan

- Pemeliharaan/rehab 51 Km
- Peningkatan 382 Km
- Penyelesaian pembangunan 16 Km

Jembatan



Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 4.531 unit



Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 45.633 Ha:

- Saluran Primer 75.904 M
- Saluran Sekunder 116.758 M

Pembangunan/peningkatan 14.698 Ha jaringan irigasi:

- Saluran Primer 19.739 M
- Saluran Sekunder 146.296 M

DAK NONFISIK

- BOS : 5.401.998 siswa
- PAUD : 882.735 murid
- TPG : 167.957 guru
- Tamsil : 18.682 guru
- TKG : 319 guru
- BOK : 879 puskesmas
- BOKB : 1.415 balai penyuluhan KB
- PK2UKM : 669 peserta pelatihan

DANA DESA

Output Dana Desa	Jumlah
Air Minum & Sanitasi	33,856
Air Bersih (Unit)	31,995
MCK (Unit)	1,550
Sumur (Unit)	311
Infrastruktur	312,553
Jalan Desa (Panjang = km)	132
Jembatan (Panjang = m)	312,365
Tambatan Perahu (Unit)	56
Tembok Penahan Tanah (Unit)	-
Kesehatan	985
Polindes (Unit)	370
Posyandu (Unit)	615
Pasar	1,600
Pasar Desa (Unit)	1,600
Pendidikan	3,750
Paud (Unit)	3,750
Pengairan	3,811
Drainase (Unit)	-
Embung (Unit)	29
Irigasi (Unit)	3,811



Rincian Kriteria Utama dan Indikator Kinerja DID Tahun 2019

Kriteria Utama



Indikator Kinerja

✓ Opini BPK minimal WTP

✓ Penetapan Perda APBD Tepat Waktu

✓ Penggunaan e-government

✓ Kemudahan Berusaha

Aspek

Kategori

Indikator

Input

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah: (i) *Local Taxing Power*, (ii) *Quality of Spending*, (iii) *Quality of Budget*, (iv) *Fiscal Space*, dan (v) SILPA ratio

Proses

Pelayanan Pemerintahan Umum

- i. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- ii. Perencanaan Daerah,
- iii. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
- iv. Inovasi Pelayanan Publik,
- v. Kemudahan Investasi, dan
- vi. Pengelolaan Sampah

Output

Pelayanan Dasar Publik

- Pendidikan → RLS, APM SMP, HLS
- Kesehatan → Baduta Stunting, Imunisasi Balita, Persalinan Tenakes,
- Infrastruktur → Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Jalan Mantap

Outcome

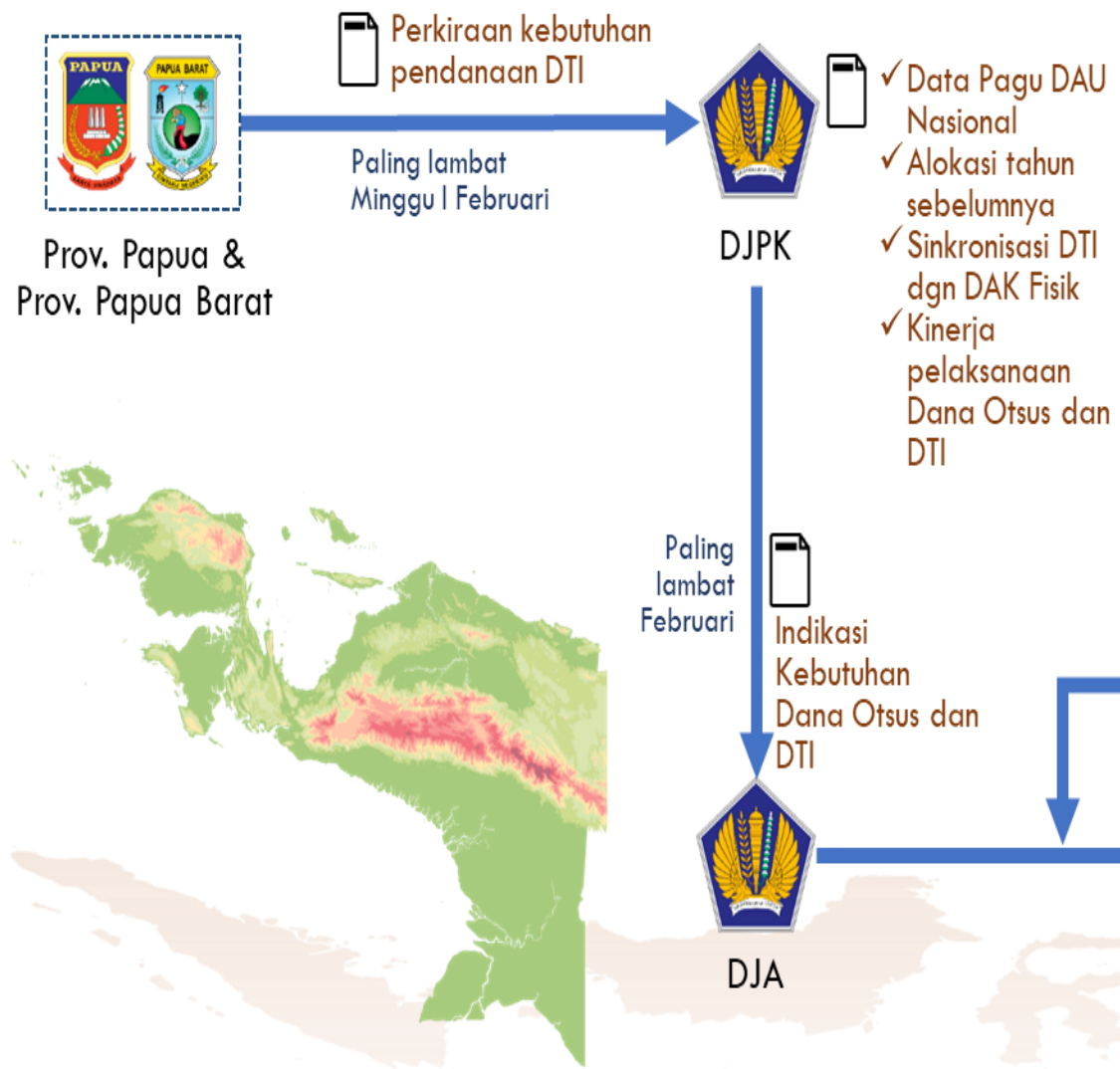
Kesejahteraan

- Penurunan Tingkat kemiskinan
- IPM





DANA OTSUS DAN DTI: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN



Perkiraan kebutuhan pendanaan DTI

Paling lambat Minggu I Februari



DJPK



- ✓ Data Pagu DAU Nasional
- ✓ Alokasi tahun sebelumnya
- ✓ Sinkronisasi DTI dgn DAK Fisik
- ✓ Kinerja pelaksanaan Dana Otsus dan DTI

Paling lambat Februari



Indikasi Kebutuhan Dana Otsus dan DTI



DJA



Pengalokasian Dana Otsus di DJPK

Provinsi Aceh

Provinsi Papua dan Papua Barat

2% dari total pagu DAU Nasional



Tahun 2007 - 2021 → 2%
2022 - 2026 → 1%

2% selama 20 tahun (2002 - 2021)

Proporsi pembagian:

70% untuk Papua dan 30% untuk Papua Barat

(sama dengan tahun sebelumnya)

Indikasi Kebutuhan Dana dan proses pengalokasian menjadi **dasar alokasi Dana Otsus dan DTI dalam APBN**



DANA KEISTIMEWAAN DIY: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN





DANA DESA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN



PERENCANAAN



PENGANGGARAN



PENGALOKASIAN



Jan - April

Penyusunan Indikasi Kebutuhan Pagu Dana Desa dan Pagu Indikatif Dana Desa

Mei - Juni

- Penetapan dan Pembahasan RKP
- Penyusunan RKA BUN (Dana Desa)

Juni - Juli

- Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
- Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa

Juni - Agustus

- Penyampaian data jumlah desa
- Penyampaian data dasar desa

Sept - Okt

Simulasi penghitungan (alokasi dasar : alokasi afirmasi : alokasi formula)

Juli - Okt

- Pembahasan &Persetujuan RAPBN, RUU APBN dan NK
- Penyesuaian RKA BUN (Dana Desa)

Nov - Des

- Penyusunan RPerpres Rincian APBN
- Penyusunan DIPA BUN

MENTERI KEUANGAN

DANA DESA PER KAB/KOTA



BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

*Memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan sesuai **PP No. 7/2018 tentang Kecamatan** untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan*

A L O K A S I

PAGU 2019 **Rp3 T**

Dalam bentuk **DAU TAMBAHAN**

- **KEBIJAKAN** ini bersifat **melengkapi** tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada Kelurahan melalui **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**.
- **Memperkuat pengawasan** dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di Daerah karena pendanaan tersebut bagian dari Belanja APBD.
- **Pengendalian** melalui penyaluran dan **penguatan pemantauan dan evaluasi**.

S A S A R A N

- Dialokasikan untuk **8.212 Kelurahan pada 410** Kabupaten/Kota.
- Dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

KATEGORI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KELURAHAN	DAU PERKELURAHAN	PAGU
SATUAN	DAERAH	KELURAHAN	JUTA	MILIAR
BAIK	91	2.805	352,94	990,00
PERLU DITINGKATKAN	257	4.782	370,14	1.770,00
SANGAT PERLU DITINGKATKAN	62	625	384,00	240,00
TOTAL	410	8.212		3.000,00



DANA DESA: PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN



PENYALURAN



PENGGUNAAN



PEMANTAUAN



	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
--	---------	----------	-----------

PERSENTASE PENYALURAN	20 %	40 %	40 %
------------------------------	------	------	------

BATAS WAKTU PENYALURAN	Januari s.d. minggu ke-3 Juni	Maret s.d. minggu ke-4 Juni	Paling cepat Juli
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------

DOKUMEN PERSYARATAN

RKUN-RKUD		
1. Perda APBD	Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya	1. Laporan penyaluran DD s.d. Tahap II min 75%. 2. Laporan realisasi penyerapan DD s.d. Tahap II min 75% dan capaian output min 50%
RKUD-RKD		
Perdes APBDes	Laporan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya	1. Laporan realisasi penyerapan DD s.d. Tahap II min 75% 2. capaian output min 50%

diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

PEMBANGUNAN DESA

- Sarana Prasarana,
- Pelayanan Sosial Dasar,
- Sarana Ekonomi Desa,
- Pembangunan Embung,
- Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
- Penanggulangan Bencana Alam

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar,
- Pengelolaan Sumber Daya Lokal,
- Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif,
- Penguatan Kapasitas terhadap Bencana,
- Pelestarian Lingkungan Hidup & Penguatan, dan
- Tata Kelola Desa yang Demokratis



Penyelenggaraan pemerintahan

Pembinaan kemasyarakatan

Penetapan perkara mengenai tata cara pembagian dan penetapan DD setiap Desa

Untuk menghindari keterlambatan penetapan perkara

Penyaluran DD Dari RKUD ke RKD

Untuk memastikan penyaluran DD tepat waktu dan tepat jumlah

Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan DD

Untuk menghindari penundaan penyaluran DD tahap berikutnya

Sisa DD di RKUD

Untuk mengetahui besaran DD yg belum disalurkan dari RKUD ke RKD TA sebelumnya

SESI 2

PENGELOLAAN PDRD

Memperkuat local taxing power dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat

JENIS PDRD UTAMA

PAJAK PROVINSI

- Pajak Kendaraan Bermotor
- BBNKB
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

PAJAK KAB/KOTA

- PBB P2
- BPHTB
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan

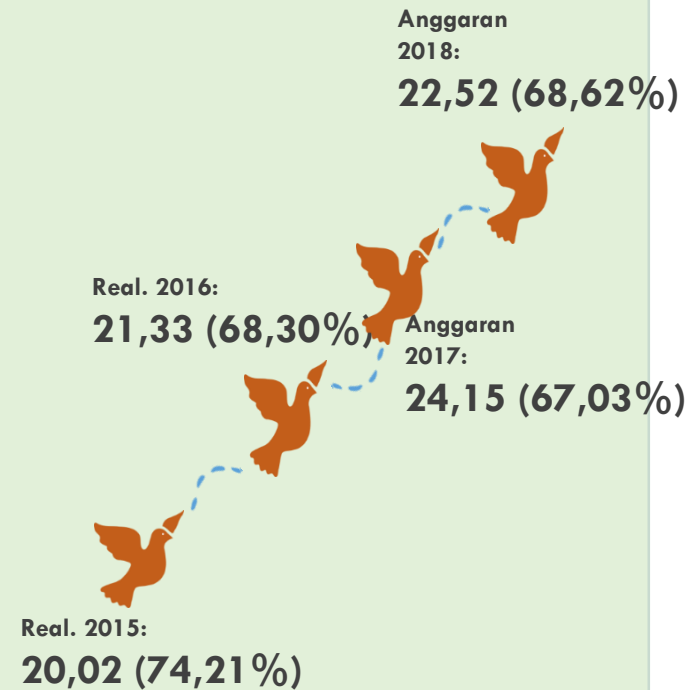
RETRIBUSI DAERAH

- Ret. Pelayanan Kesehatan
- Ret. Izin Mendirikan Bangunan
- Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah
- Ret. Pelayanan Pasar

TANTANGAN

- Penerimaan Pajak Daerah belum optimal.
- Tenaga aparatur pengelola pajak daerah (tenaga pemeriksa, penagih, dan penilai khususnya Penilai PBB-B2) yang masih kurang.
- Basis data perpajakan daerah yang belum dikelola secara baik.
- Modernisasi perpajakan yang belum secara optimal dilakukan.

Total PDRD & % terhadap PAD Se-Prov. JATIM



(Dalam Triliun Rp)



Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk akselerasi pembangunan di daerah

JENIS PEMBIAYAAN DAN TUJUAN

PINJAMAN DAERAH

- Bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Institusi Perbankan, Institusi Non-Perbankan untuk pembiayaan infrastuktur.

OBLIGASI DAERAH

- Bersumber dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur yang menghasilkan pendapatan untuk APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat.

KPBU

- Kerjasama untuk pembangunan infrastruktur sosial ekonomi, melalui: *Project Development Facility (PDF)*, *Viability Gap Fund (VGF)*, dan Penjamin Infrastruktur .

PINA

- Membiayai infrastruktur strategis nasional yang memiliki nilai komersil, dengan prioritas proyek yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial

TANTANGAN

- Merubah *mindset* dari pembiayaan tradisional menjadi pembiayaan kreatif;
- Identifikasi proyek strategis;
- Pemilihan sumber pembiayaan;
- Persetujuan DPRD;
- Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), AMDAL; dan
- Pengelolaan proyek.

Total PINJAMAN DAERAH Se-Prov. JATIM





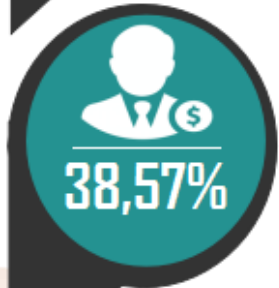
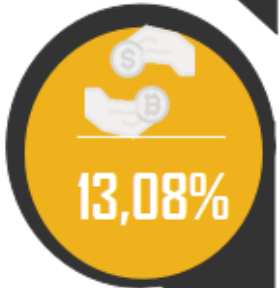
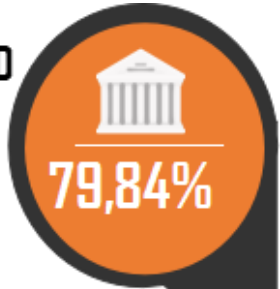
TANTANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Daerah perlu terus melakukan perbaikan dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menunjukkan adanya tingginya ketergantungan daerah dan kurangnya kualitas belanja daerah.

Ketergantungan APBD terhadap TKDD

- Kab. Badung (10,61%)
- Bolaang Mongondow Timur (97,12%)

- Kota Surabaya (27,07%)
- Kab. Sumenep (83,44 %)



Rata-Rata Nasional

Porsi Belanja Modal

- Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (50,98%)
- Kab. Kuningan (6,35%)

- Kota Surabaya(29,69%)
- Kota Kediri (10,38%)

Porsi Belanja Pegawai

- Kota Bengkulu (55,81%)
- Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (24,1%)

- Kab. Trenggalek (51,03%)
- Kota Surabaya (29,14%)

● Terbaik
● Terburuk



“Tata kelola keuangan daerah yang tidak **transparan dan akuntabel** menjadi rawan terhadap **penyalahgunaan, penyelewengan, dan praktek-praktek koruptif**”

PROVINSI JAWA TIMUR



30 Temuan atas ketidapatuhan terhadap peraturan

* LHP BPK Sem.II 2017



Beberapa kepala daerah disangka terlibat kasus korupsi



Dampak finansial, termasuk kerugian dan potensi kerugian negara **Rp16,68 M**

* LHP BPK Sem.I 2016

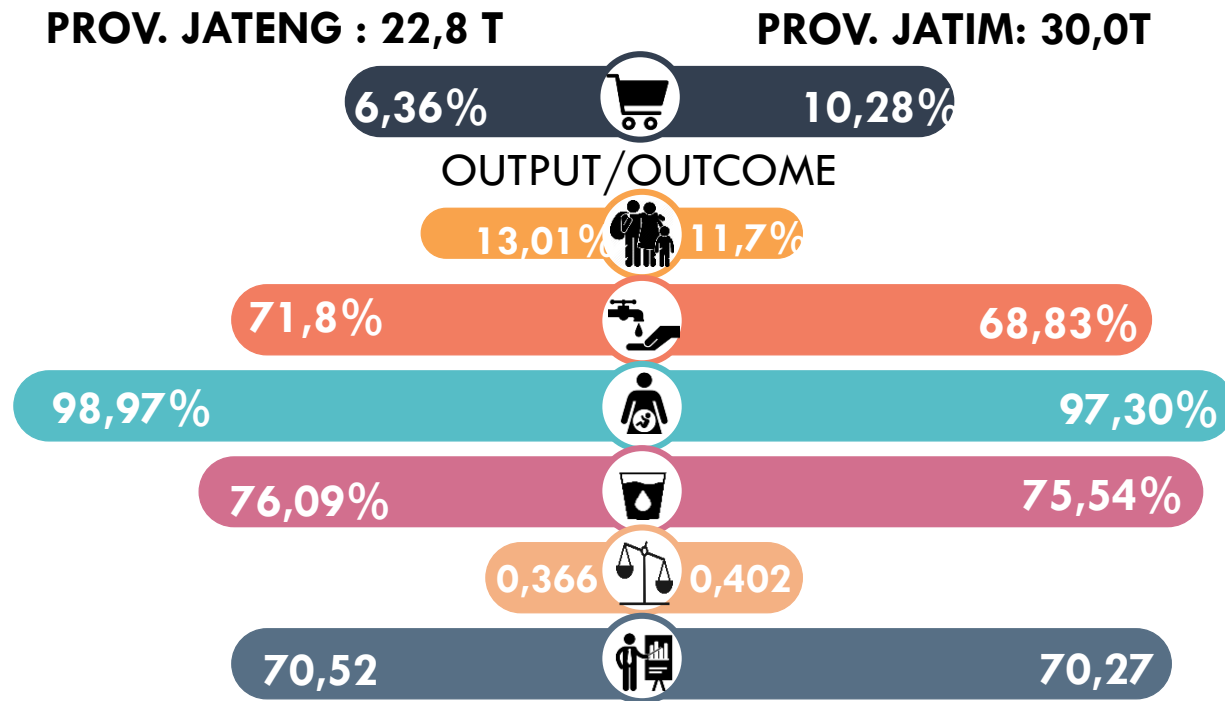


Korupsi sebagian besar terjadi pada pelaksanaan **pengadaan konstruksi bangunan.**

PRINSIP VALUE FOR MONEY

VALUE FOR MONEY: utilitas yang diperoleh dari setiap rupiah uang yang dibelanjakan, baik dengan meminimalkan dana APBD dan menarik sebanyak mungkin investasi swasta maupun mengoptimalkan dana APBD secara efektif dan efisien untuk peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kesejahteraan

(Perbandingan daerah dengan anggaran belanja yang hampir sama, tapi komposisi dan output/outcome berbeda)



- Capital expenditure
- Poverty Rate
- Improved Sanitation
- Assisted Birth Delivery
- Decent Drinking Water
- Gini Ratio
- Human Development Index



Kinerja Perekonomian

PDRB Tertinggi

Kota Surabaya Rp451,38 T

Growth Tertinggi

Kab. Bojonegoro 14,35%

Inflasi Terendah*

Kab. Kediri 1,65%

PDRB Terendah

Kota Blitar Rp5,3 T

Growth Terendah

Kab. Bangkalan 4,87%

Inflasi Tertinggi*

Kota Surabaya 3,1%

Kinerja Kesejahteraan

PDRB per Kapita Tertinggi

Kota Kediri Rp379 Jt

Penduduk Miskin Terendah

Kota Malang 4,17%

IPM Tertinggi

Kota Malang 80,46

PDRB per Kapita Terendah

Kab. Pamekasan Rp15,8

Penduduk Miskin Tertinggi

Kab. Sampang 23,56%

IPM Terendah

Kab. Sampang 59,09%



Pengelolaan keuangan daerah perlu berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance* yang merupakan syarat penting (*necessary condition*) bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pro rakyat.

PRINSIP-PRINSIP APBD BERASASKAN GOOD GOVERNANCE



STRATEGI BELANJA DAERAH PRO RAKYAT

FOKUS BELANJA:

- Perluasan kesempatan kerja
- Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
- Pengentasan kemiskinan
- Pengurangan ketimpangan antar kelompok masyarakat
- Perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik

Stream Lining Belanja Pegawai & Operasional dan memperbesar porsi belanja produktif, belanja modal untuk infrastruktur publik dibandingkan dengan belanja pegawai

Penetapan Perda APBD secara tepat waktu

Optimalisasi dana *idle* melalui PERKADA SBM, SBK, dan Satuan Harga.

Pemenuhan Belanja Wajib :

- Pendidikan 20%
- Kesehatan 10%
- Infrastruktur 25% DAU & DBH
- Alokasi Dana Desa 10% DAU & DBH

Perencanaan dan pengawasan keuangan daerah melalui E-Government: E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement serta peran masyarakat.

Refocusing perencanaan belanja APBD pada program prioritas dan ketepatan waktu penetapan APBD yang didukung percepatan pelaksanaan serta penyerapan agar berdampak ekonomi dan sosial.

PERAN SERTA CIVITAS AKADEMIKA



Kunci keberhasilan negara ada pada *generasi mudanya* yang berkualitas. Saat ini terdapat $\pm 30\%$ penduduk Indonesia yang berumur 15-34 th. (*generasi milenial*).

Peranan Mahasiswa/Akademisi:

- Melakukan kajian/penelitian/analisis *evidence based* dengan *output* yang dapat digunakan tidak hanya untuk pengembangan kelembagaan perguruan tinggi namun juga menjadi solusi masalah pembangunan.
- Memberi masukan/kritik secara positif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
- Mengawasi pelaksanaan pembangunan secara bersama-sama untuk menjaga akuntabilitas demi tujuan kesejahteraan bersama.
- Aktif sebagai **Agent of Change**, tidak hanya sebagai **penggagas** tetapi juga **pelaku** perubahan untuk mengembangkan daerahnya masing-masing.

PENUTUP



- **Dunia akan berbeda dengan saat ini**, teknologi sudah semakin maju (*Driverless car, Artificial Intelligence, Internet of things*)
- **Konsep pertanian, pangan, energi, transportasi dan konstruksi** makin efisien, mobilitas dan tata ruang perkotaan makin efisien, mudah dan murah (redesain DNA, transportasi antar planet)
- **Ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan pasokan air** menjadi faktor kunci dalam perekonomian dan hubungan antar negara.
- **Penguasaan Teknologi, Inovasi dan Produktivitas** menjadi faktor kunci dalam kompetisi global.

“Mahasiswa menjadi kaum milenial untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah sebagai kunci keberhasilan Indonesia menjadi negara maju...”



TERIMA KASIH





KESEHATAN

1. Ambulans **241 unit**
2. Puskesmas keliling **692 unit**
3. Rehabilitasi/pembangunan sarana kesehatan **5.463 unit**



AIR MINUM

Penyediaan sumber air minum layak bagi :

- a. **781.314 jiwa** melalui peningkatan:
 - Sambungan Rumah/SR: **1.324 unit**
 - SR Murah: **124.828 unit**
 - SR Komunal: **809 unit**
- b. **381.471 jiwa** melalui pembangunan SPAM dengan
 - SR: **200 unit**
 - SR Murah: **60.149 unit**
 - SR Komunal: **654 unit**



PENDIDIKAN

1. Rehabilitasi ruang belajar **28.278 kelas**
2. Pembangunan tuang kelas baru **5.284 kelas**
3. Laboratorium **1.921 ruang**
4. Ruang praktik siswa **1.882 ruang**

PERUMAHAN



Pembangunan baru/perbaikan total: **2.790 unit**
 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: **53.922 unit**

IRIGASI



Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas **184.483 Ha**:

Saluran Primer **935.253 m**
 Saluran Sekunder **1.893.448 m**
 Saluran Tersier **233.057 m**

Rehabilitasi **344.698 Ha** jaringan irigasi:

Saluran Primer **727.241 m**
 Saluran Sekunder **1.575.777 m**
 Saluran Tersier **90.817 m**

JALAN

Jalan

Pemeliharaan/rehab **1.503 Km**
 Peningkatan **9.798 Km**
 Penyelesaian pembangunan **1.033 Km**

Jembatan

Pemeliharaan/rehab **291 m**
 Penggantian **4.916 m**
 Penyelesaian pembangunan **3.749 m**

SANITASI



1. Peningkatan fasilitas sanitasi untuk **77.817 jiwa**
2. Pembangunan prasarana sanitasi untuk **848.669 jiwa**



TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2018



KESEHATAN

Nasional

1. Ambulans 591 unit
2. Puskesmas keliling 773 unit
3. Rehabilitasi/pembangunan sarana kesehatan 5.764 unit



AIR MINUM

Nasional

Penyediaan sumber air minum layak bagi :

- a. 851.722 jiwa melalui perluasan SPAM dengan pemanfaatan *idle capacity* SPAM.
- b. 590.708 jiwa melalui pembangunan baru
- c. 118.490 jiwa melalui peningkatan kapasitas/volume SPAM



PENDIDIKAN

Nasional

1. Rehabilitasi ruang belajar 27.289 ruang
2. Pembangunan tuang kelas baru 8.959 ruang
3. Laboratorium 2.113 ruang
4. Ruang praktik siswa 171 ruang
5. Mess/rumah dinas guru 3.944 unit



PERUMAHAN

Nasional

Pembangunan baru/perbaikan total :

- rumah swadaya untuk 2.675 unit
- rumah khusus untuk 312 unit

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk 52.350 unit

IRIGASI & PERTANIAN



Nasional

- Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 191.707 Ha, dan Rehabilitasi 173.622 Ha jaringan irigasi
- Pembangunan 8.200 unit sumber air
- Pembangunan 600 Km jalan usaha tani

JALAN

Nasional

Jalan

Pemeliharaan/rehab 616 Km

Peningkatan 89.628 Km

Penyelesaian pembangunan 6.187 Km

Jembatan

Penggantian 1.383 m

Penyelesaian pembangunan 3.436 m

SANITASI



Nasional

1. Peningkatan fasilitas sanitasi untuk 229.253 jiwa
2. Pembangunan prasarana sanitasi untuk 1.309.671 jiwa

